

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kerja sama militer antara Indonesia dan Prancis pada periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dalam intensitas maupun bentuk implementasinya. Bentuk kerja sama tersebut mencakup latihan militer bersama lintas matra seperti Mission Pegase, Mission La Pérouse, Garuda Guerrier, Volfa 24, hingga Passing Exercise dan Super Garuda Shield; kunjungan kapal perang dan dialog strategis antar kementerian; serta integrasi sistem alutsista seperti pesawat Rafale dan radar GM403. Secara strategis, Prancis melihat Indonesia sebagai mitra rasional di Asia Tenggara pasca pembentukan AUKUS dan pembatalan kontrak kapal selam oleh Australia. Indonesia dipilih karena posisinya yang strategis, sikap non-blok, dan potensi pasar industri pertahanan. Sementara itu, Indonesia merespons kerja sama ini secara pragmatis sebagai peluang untuk memperkuat modernisasi militer, akses terhadap transfer teknologi, dan pengembangan industri pertahanan nasional.

Melalui pendekatan Rational Choice, kerja sama ini mencerminkan kalkulasi strategis kedua negara dalam menghadapi dinamika kawasan Indo-Pasifik. Bagi Prancis, ini merupakan bagian dari pemulihan pengaruh geopolitik; bagi Indonesia, ini adalah instrumen untuk memperkuat posisi strategis dan meningkatkan kapasitas pertahanan tanpa bergantung pada satu kekuatan besar. Ke depan, Indonesia seharusnya dapat memaksimalkan potensi kerja sama ini dengan menekankan aspek kemandirian, seperti peningkatan komponen lokal, produksi bersama, dan pembangunan pusat pemeliharaan dalam negeri. Kerja sama militer dengan Prancis berpotensi menjadi salah satu pilar strategis dalam menjaga otonomi pertahanan Indonesia sekaligus memperkuat posisi negara dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis ke depan. Bagi Indonesia, penting untuk memastikan bahwa kerja sama dengan Prancis tidak hanya bersifat

transaksional, tetapi benar-benar mendorong kemandirian industri pertahanan. Pemerintah perlu mengoptimalkan skema offset dan transfer teknologi, sekaligus memperkuat regulasi untuk memastikan bahwa industri lokal mampu menyerap dan mengembangkan teknologi yang ditransfer. Selain itu, Indonesia sebaiknya tetap menjaga kebijakan diversifikasi mitra pertahanan, termasuk dengan AS, China, dan Rusia, untuk menghindari ketergantungan pada satu negara dan memperkuat posisi tawarnya di tengah persaingan geopolitik.

Bagi Perancis, penting untuk menjaga konsistensi komitmen dalam kerja sama jangka panjang dengan Indonesia, terutama dalam hal alih teknologi dan investasi industri pertahanan. Pendekatan Macron yang menekankan *strategic autonomy* sudah tepat, namun perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak negara ASEAN untuk memperkuat posisi Perancis sebagai aktor kredibel di kawasan.

Perlu penelitian lebih lanjut untuk menganalisis efektivitas diplomasi pertahanan Perancis dibandingkan dengan negara lain seperti AS atau China, serta dampak ekonomi dari kerja sama industri pertahanan terhadap pertumbuhan teknologi dan kapabilitas pertahanan Indonesia. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya bermanfaat secara strategis, tetapi juga mendorong kemandirian dan stabilitas kawasan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, diplomasi pertahanan Perancis di Indonesia di bawah kepemimpinan Macron telah membuka jalan bagi kemitraan strategis yang setara dan saling menguntungkan. Namun, tantangan seperti ketimpangan teknologi dan dinamika geopolitik global harus diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.